

Pemerintah Diminta Evaluasi Total Program MBG

Dari Halaman 1

"Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung," kata Puan.

"Sebenarnya, masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa," imbuh dia.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis kasus siswa

keracunan program MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.

Data hingga 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau bertambah 1.092 kasus dalam kurun sepekan.

Ada lima provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Masing-masing yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan usulan untuk menghentikan MBG saat ini sulit dilakukan. Dia bilang MBG merupakan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo, yang anggarannya telah disiapkan.

Sehingga, solusi atau upaya yang paling mungkin dilakukan adalah dengan menekan angka keracunan.

"Tapi saat ini Presiden merasa program ini strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan," katanya dalam rapat Komisi IX, Senin (22/9). (cnni/js)

Mahasiswa IPB Dianiaya Pekerja TPL

Dari Halaman 1

Insiden dilaporkan terjadi di kawasan Danau Toba, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (22/9).

Rektor IPB University, Arif Satria menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut, dan mengatakan pihaknya bakal mengambil langkah yang diperlukan.

"Kami sangat prihatin pada kasus yang menimpa Saudari Feny, yang menjadi korban pemukulan. IPB University akan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti kasus tersebut," kata Arif dalam keterangannya, Selasa (23/9).

Arif mengungkap telah menugaskan Dekan Fema IPB University, Sofyan Sjaif untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan Polda Sumatera Utara untuk mengumpulkan fakta dan kronologi kejadian.

IPB, lanjut dia, menegaskan sikap untuk memberikan perlindungan kepada Feny selaku mahasiswanya.

"Pada prinsipnya, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswi kami," katanya.

Sementara, Dekan Fema IPB University, Sofyan Sjaif mengaku akan segera bertolak ke lokasi. Dia bakal berkoordinasi dengan Polda Sumut untuk mendalami insiden tersebut.

"Kami juga akan bertemu dengan Saudara Feny dan keluarga untuk memastikan kondisi kesehatan fisik dan mental Feny tertangani dengan baik," ungkap Sofyan.

Feny Siregar, mahasiswi semester IX IPB mengaku sedang melakukan penelitian skripsi tentang petani di areal konflik agraria dalam perspektif gender dengan obyek Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut yang terletak di kawasan Danau Toba, Desa Sihaporas.

Saat kejadian penyerbuan ratusan pekerja PT TPL, Senin siang, Feny mengaku tengah bersama warga. Ia pun mendokumentasikan foto dan video pemukulan serta penganiayaan oleh pekerja TPL. Akibatnya, Feny jadi korban kekerasan.

"Saya dikejar-kejar pekerja TPL. Mungkin karena saya mengenakan jaket kampus IPB," kata Feny lewat keterangan tertulis.

Saat itu, ratusan pekerja TPL menggunakan mobil truk masuk ke wilayah konflik agraria dengan lahan Lamtoras, yang telah mereka Huni turun-temurun 11 generasi.

"Saya sembunyi di Posko yang juga hunian masyarakat adat. Saat pekerja TPL memukuli warga, saya juga dipukul. Mengira saya pihak LSM sebagai provokator padahal saya sudah bilang mahasiswa. Kepala saya kena pukul kayu alat pekerja TPL," kata Feny yang kini dirawat di Rumah Sakit Harapan, Pematangsiantar.

"Waktu mereka memukuli saya, mereka bilang, 'Kau provokator kan. Kau bukan mahasiswa, tapi kau dari LSM kan,'" kata Feny

Feny mengaku bagian kepalanya kena pentiongan dan bengkok. Dalam situasi chaos, jaket almamater IPB yang lepas dari tubuh Feny, tertinggal di Posko LAMTORAS.

Di sisi lain, Sekretaris Umum Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Marihut Ambarita mengatakan, terdapat 33 orang korban luka-luka akibat aksi pekerja PT TPL. Di antara korban ada perempuan dan anak.

"Di antaranya, anak Dimas Ambarita, usia 17 tahun. Dimas penyandang disabilitas, kaki tidak normal, kesulitan berjalan," katanya.

Selain, Feny, Putri Ambarita (25), juga mengalami luka serius. Lulusan Sarjana Teknik Informatika Universitas Prima Medan ini tengah bersama Feny Siregar, di Posko. Feny menjelaskan Putri adalah kakak kandung Dimas. Mereka bermaksud melindungi Dimas agar tidak dipukuli pekerja TPL.

"Kak Putri sampai berlutut memohon agar tidak dipukuli. Namun pekerja TPL tidak peduli. Kami dihajar," Kata Feny.

"Menurut dokter, kondisinya parah. Agak linglung. Jadi kata dokter akan dibawa untuk konsultasi lanjutan ke psikolog atau psikiater," katanya.

Feny juga mengatakan, dua orang ibu bernama Delima Sinaga dan Rosnawati Ambarita jadi korban pemukulan.

Kepala Desa Sihaporas tahun 2002-2004,

Baren Ambarita, mengatakan perlakuan pekerja TPL memang beringas.

"Pekerja bersenjata pentungan kayu, tameng rotan, helm dengan penutup wajah. Mereka beringas memukuli warga masyarakat adat. Saat kami ajak dialog, massa pekerja TPL berteriak, tidak ada lagi dialog," katanya.

Sebelumnya, Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara, Boy Raja Marpaung mengatakan penyerbuan bermula saat puluhan petani yang tergabung Lamtoras sedang berladang Senin pukul 07.00 WIB. Tiba tiba rombongan pekerja TPL datang dengan 10 kendaraan, terdiri dari 7 truk dan 3 mobil pribadi.

"Para pekerja PT TPL itu mengenakan seragam hitam-hitam, membawa parang bengkok, tongkat listrik, rotan, kayu, hingga tameng. Mereka datang sekitar 150 orang, mirip pasukan anti huru-hara," ujar Boy Raja Marpaung, dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa.

Boy menyebutkan, awalnya sempat terjadi perdebatan antara petani dan rombongan pekerja TPL. Namun, suasana memanas ketika salah seorang perempuan masyarakat adat dipukul hingga giginya copot.

"Kemudian para petani panik dan bentrokan pecah. Petani dipukul mundur. Keributan semakin meluas ketika sekitar 500 pekerja dan petugas keamanan TPL datang kembali. Mereka bahkan merusak tanaman kopi, jahe, dan jagung, serta menghancurkan alat pertanian," jelasnya.

Di sisi lain, Corporate Communication Head PT TPL, Salomo Sitohang mengatakan, peristiwa bermula ketika rombongan pekerja hendak menuju lokasi pemanenan dan penanaman eukaliptus.

Namun, di tengah perjalanan mereka dihadang sekelompok orang yang melakukan pelemparan batu serta memblokir jalan dengan kayu gelondongan.

Akibat konflik, sedikitnya enam orang pekerja PT TPL mengalami luka-luka dan dua unit mobil operasional dibakar. Seluruh korban telah dibawa ke RSUD Parapat untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Perusahaan juga sudah melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang," ujar Salomo dalam keterangan tertulis. (cnni/js)

Pelayanan Puskesmas Tuar Amplas Mengecewakan

Dari Halaman 1

pada Pukul 14.00 WIB, Selasa (23/9), untuk meminta surat rujukan untuk berobat ke rumah sakit, petugas di sana mengatakan kalau Puskesmas tersebut sudah tutup.

"Tadi aku datang ke Puskesmas di Jalan Tuar untuk berobat kedua kalinya, Minggu lalu sudah berobat, sakit yang diderita telinga

berdengung sebelah kiri dan kanan, serta kulit gatal-hatal di kaki, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Makanya mau minta surat rujukan dokter ke rumah sakit agar diperiksa dokter spesialis telinga dan kulit," ucap Hasibuan.

Ia mengaku menggunakan Asuransi BPJS Kesehatan, dimana tiap bulan secara rutin membayar iurannya.

"Saat berobat aku pakai BPJS, tapi tetap

juga tidak bisa keluar rujukan ke rumah sakit. Apakah harus sudah infeksi telinga aku baru bisa dirujuk. Tadi kata pegawai di Puskesmas itu, tidak ada dokter dan jam operasional hanya sampai jam 12.00 WIB," sesalnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Medan, Yudha dikinfiriasi awak media via Whatsaap terkait hal tersebut dan SOP jam operasional pelayanan Puskesmas di Kota Medan, belum berkomentar. (A-11)

Kejari Belawan Tahan Bendahara SMAN 19 Medan

Dari Halaman 1

tanggal 16 September 2025 dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Medan.

TJT selaku penyedia Barang dan Jasa pada SMAN 19 Medan ditahan berdasarkan Surat Perintah penahanan Nomor : PRINT : 06/L.2.26.4 /Fd.1/09/2025 tanggal 22 September 2025 sampai dengan 11 Oktober 2025.

Kasi Intel Kejari Belawan, Daniel Kurniawan Barus SH dalam keterangannya mengatakan, bahwa penyidik melakukan penahanan di rutan terhadap masing-masing tersangka dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan pertimbangan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, tersangka dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan tersangka dikhawatirkan akan mengulangi melakukan tindak pidana.

"Penahanan dilakukan terhadap masing-masing tersangka untuk mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara," kata Daniel saat dikonfirmasi, Selasa (23/9/2025).

Dalam kasus ini, jelasnya, perbuatan para tersangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ucapnya.

Dipaparkan Daniel, tersangka selaku Bendahara Sekolah SMA Negeri 19 Medan dan selaku Penyedia Barang dan Jasa yang bertanggung jawab dalam penggunaan Dana BOS pada SMAN 19 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Tahun 2022 s/d 2023 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

"Tak sesuai juga dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sehingga menimbulkan kerugian negara dan hal ini bertentangan dengan hukum dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelasnya.

Dijelaskannya lagi, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, SMA Negeri 19 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan rincian sebagai berikut: a. Dana BOS T.A. 2022 sebesar Rp 1.796.220.000,- b. Dana BOS T.A. 2023 sebesar Rp 1.796.220.000,-. Jumlah keseluruhan sekitar Rp 3.592.440.000.

"Akibat perbuatan para tersangka bersama – sama dengan Tersangka RN (selaku Kepala Sekolah yang sudah ditahan sebelumnya) negara mengalami kerugian dengan Jumlah kurang lebih Rp 772.711.214," pungkasnya. (bes/js)

Gerakan Pangan Murah, Bantuan Sementara atau

Dari Halaman 1

hingga supermarket lokal. Semua itu berawal dari kasus pengoplosan beras yang melibatkan perusahaan besar seperti Wilmar dan lainnya. Akibatnya, rakyat kecil jadi korban.

Kini memang ada sedikit kelegaan. Harga beras relatif turun. Minyak goreng Minyakita yang sempat Rp17 ribu per liter sudah kembali ke kisaran Rp16 ribuan. Tapi gula pasir masih mbandel di harga Rp18 ribuan per kilogram. Pasar murah pun tak mampu menurunkannya secara signifikan. Artinya, gerakan pangan murah ini memang membantu, tapi belum menyelesaikan akar persoalan.

Apalagi, gerakan ini bukan hanya inisiatif Pemkab Deliserdang. Pemerintah provinsi bahkan pusat juga ikut menggelar operasi pasar dan bagi

bagi sembako. Dengan subsidi harga, warga bisa membeli lebih murah dari harga pasar. Rakyat memang diuntungkan. Tapi mari kita lihat sisi lain, dimana pedagang kecil justru jadi pihak yang dirugikan. Kedai-kedai kelontong yang biasa menjual beras, minyak, dan gula, tiba-tiba ditinggalkan pembeli. Warga lebih memilih antre di pasar murah. Dagangan pedagang kecil tak laku, bahkan menumpuk.

Jika kondisi ini terus berulang, berapa lama para pedagang kecil itu bisa bertahan? Apakah kita mau membela rakyat di satu sisi, tapi dalam waktu yang sama mematikan usaha rakyat kecil di sisi lain?

Gerakan pangan murah sejatinya adalah pertolongan pertama. Ia bisa menolong warga untuk sesaat, tapi tidak akan menuntaskan penyakit mahalnya harga pangan. Pemerintah harus

berani masuk lebih dalam mulai dari membenahi tata niaga, memutus mata rantai tengkulak, dan membongkar siapa pemain besar yang sengaja mengerek harga untuk keuntungan sepihak.

Islam mengajarkan bahwa timbangan harus adil dan tidak boleh merugikan hak orang lain. Itu artinya, harga pangan bukan sekadar urusan ekonomi, tapi juga urusan keadilan sosial. Selama distribusi dikuasai segelintir orang, rakyat akan terus jadi korban.

Maka, setelah gerakan pangan murah ini usai, jangan biarkan rakyat kembali membeli beras mahal, gula mencekik, dan minyak goreng yang harganya naik turun seperti cuaca. Deliserdang dan daerah-daerah lain di negeri ini membutuhkan kebijakan pangan yang berpihak, bukan hanya seremonial. Butuh keberanian melawan mafia pangan, bukan sekadar spanduk pasar murah. (*)

ESDM Hukum 190

Dari Halaman 1

kan melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan termasuk juga lingkungan di wilayah IUP. (cnni/js)

Direksi Laport ke

Dari Halaman 1

dibutuhkan PT KIM dalam pengembangan perusahaan. "Kami mendukung terhadap pengembangan PT KIM agar semakin terbuka, kuat dan berkembang, serta meningkatkan investasi dengan mendatangkan lebih banyak investor," tuturnya.

Menurutnya, Medan perekonomian ditopang oleh barang dan jasa, termasuk di dalamnya PT KIM yang menjadi salah satu potensi pendapatan ekonomi bagi Kota Medan. Tentunya potensi ini harus terus dikembangkan untuk pembangunan Kota.

"Dalam perkembangan ekonomi, kita harus dapat mengejar kota lainnya khususnya kota yang memiliki kawasan Industri. Kami berharap KIM geliatnya semakin kuat," ungkapnya.

Terkait permasalahan sengketa lahan dan penangan banjir di kawasan PT KIM, Rico Waas menegaskan akan menindaklanjuti hal tersebut. Nantinya untuk sengketa lahan Pemko Medan akan lakukan pendekatan persuasif agar permasalahan ini dapat selesai.

"Untuk permasalahan banjir, Dinas SDABMBK akan mempelajarinya secara teknis, mudah-mudahan dana hibah dari Kementerian PUPR dapat mengatasi permasalahan banjir di Kawasan PT KIM dan sekitarnya," terangnya.

Sebelumnya Direktur Utama Daly Mulyana menjelaskan kepemilikan saham PT KIM terdiri atas 60 persen Danareksa, 30 persen Pemprov Sumut, dan 10 persen Pemko Medan. Saat ini PT KIM mengalami permasalahan sengketa lahan dan mendapat atensi dari Kejaksaan Tinggi Sumut.

"Adanya sengketa lahan ini menjadi berita kurang baik untuk investasi. Oleh karenanya kami memohon agar Pemko Medan dapat membantu untuk mengatasi permasalahan sengketa lahan tersebut," ucap Direktur Utama yang hadir bersama Komisaris Utama PT KIM Nurdin Lubis, dan jajaran Direksi lainnya. (A-01)



Hidayah Reformasi Program MBG

Dari Halaman 1

sistemik dalam penyelenggaraan program ini. Alih-alih meningkatkan kesehatan, MBG justru berisiko memperburuk kondisi peserta didik. Pertanyaan publik pun mengemuka: apakah program ini benar-benar siap dari sisi manajemen, pengawasan, dan kualitas pelaksanaan? Jawabannya tampaknya adalah tidak. Karena itu, solusi strategis harus segera ditempuh agar niat baik pemerintah tidak berujung bencana kesehatan massal.

Langkah pertama adalah melakukan evaluasi total pada rantai pasok. Kasus keracunan massal sering kali terjadi akibat lemahnya kontrol pada bahan makanan, proses penyimpanan, dan distribusi. Makanan yang seharusnya disajikan segar justru basi di perjalanan karena rantai dingin tidak terjaga. Untuk itu, pemerintah perlu menerapkan sistem traceability agar asal-usul bahan baku dapat dilacak secara cepat jika terjadi masalah.

Selain itu, standarisasi penyedia makanan harus ditegakkan. Vendor penyedia makanan wajib memiliki sertifikasi laik hygiene dan sanitasi dari Dinas Kesehatan atau BPOM. Pemerintah juga perlu mengedepankan kualitas dibanding harga murah dalam proses tender. Lebih bijak bila MBG melibatkan UMKM catering lokal dengan pembinaan dan pengawasan ketat, ketimbang sekadar menggandakan vendor besar yang sering kali hanya mengejar kuantitas.

Pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis di lapangan. Uji sampel makanan secara harian wajib dilakukan di sekolah penerima program. Tes sederhana untuk mendeteksi bakteri berbahaya seperti Salmonella atau E. coli bisa menjadi benteng awal mencegah keracunan.

Pemerintah perlu membentuk tim pengawas lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPOM, sekolah, serta komite orang tua. Dengan keterlibatan berbagai pihak, transparansi meningkat dan peluang terjadinya kelalaian dapat ditekan.

Literasi dan Keterlibatan Komunitas Sekolah Guru, siswa, dan orang tua juga harus dilibatkan melalui literasi pangan sehat dan deteksi dini gejala keracunan. Edukasi sederhana mengenai tanda-tanda awal seperti mual, pusing, atau diare bisa menyelamatkan nyawa jika ditangani dengan cepat.

Selain itu, perlu disediakan jalur pelaporan cepat ketika kasus terjadi, baik melalui hotline nasional maupun sistem aplikasi digital. Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat merespons lebih cepat dan menekan jumlah korban.

Kasus keracunan massal sering kali meluas karena keterlambatan penanganan medis. Maka, setiap sekolah harus memiliki protokol darurat pangan yang terhubung langsung dengan Puskesmas atau rumah sakit rujukan. Stok obat dasar seperti oralit, karbon aktif, dan cairan infus ringan wajib tersedia di sekolah. Pemerintah juga bisa membentuk unit tanggap darurat pangan di setiap kabupaten/kota untuk mempercepat evakuasi dan pengobatan korban.

Lebih jauh, pemerintah harus mengevaluasi desain kebijakan MBG itu sendiri. Program ini sebaiknya tidak langsung digulirkan secara masif, melainkan dilakukan bertahap melalui pilot project dengan pengawasan ketat. Dari situ, kelemahan sistem bisa diidentifikasi sebelum diperluas ke seluruh daerah.

Alternatif lain adalah penerapan voucher pangan sehat yang dapat ditukar di koperasi sekolah atau warung mitra. Skema ini lebih fleksibel, menekan risiko keracunan massal, dan tetap memberikan pilihan gizi yang sehat bagi anak.

Menjaga Esensi Program Meskipun dilanda masalah serius, esensi MBG tidak boleh hilang. Program ini penting untuk mendukung gizi anak bangsa, apalagi di tengah ancaman stunting. Namun, tujuan mulia itu hanya dapat tercapai jika kualitas dan keamanan pangan dijadikan prioritas utama, bukan sekadar mengejar kuantitas penerima.

Kasus ribuan anak keracunan adalah peringatan keras bahwa program sosial sebesar ini tidak bisa dijalankan dengan pola asal jalan. Diperlukan reformasi sistemik, mulai dari pengadaan bahan, distribusi, pengawasan, hingga mekanisme tanggap darurat. Jika langkah strategis segera diambil, MBG masih bisa diselamatkan dan benar-benar menjadi investasi kesehatan sekaligus pendidikan masa depan Indonesia.